Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 47 TAHUN 2016
Tanggal : 4 Maret 2016

CONTOH KASUS DAN FORMAT

No.	Contoh Kasus dan Format	Judul
1.	Contoh Kasus 1	Wajib Pajak yang Berbeda Atas Jenis Pajak yang Sama
2.	Contoh Kasus 2	Pbk Karena Adanya Pembayaran Pajak yang Lebih Besar dari Jumlah Pajak Terhutang Dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah atau SPPT PBB-P2
3.	Contoh Kasus 3	Pbk Karena Adanya Kesalahan Pengisian SSPD Baik Menyangkut Wajib Pajak Sendiri Maupun Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Lain
4.	Contoh Kasus 4	Pbk Karena Adanya Pemecahan Setoran Pajak yang Berasal dari Satu SSPD Menjadi Setoran Beberapa Jenis Pajak atau Setoran dari Beberapa Wajb Pajak dan/atau Objek PBB-P2
5.	Contoh Kasus 5	Pbk Karena adanya Kesalahan Perekaman atau Pengisian Bukti Pbk oleh Petugas
6.	Format 1	Keputusan Mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah
7.	Format 2	Keputusan Mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
8.	Format 3	Keputusan Mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
9.	Format 4	Bukti Pbk
10.	Format 5	Cap Pbk
11.	Format 6	Nota Penghitungan Pengembalian Pembayaran Pajak
12.	Format 7	Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
13.	Format 8	Keputusan Mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
14.	Format 9	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah
15.	Format 10	Lampiran Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

CONTOH KASUS Pbk

1. Pasal 2 ayat (1) huruf b

   Terjadi kesalahan penulisan NOP pada saat pembayaran PBB-P2, sehingga PBB-P2 terbayar untuk NOP dan Wajib Pajak dari yang dimaksud penyetor. Dalam hal ini Pbk dapat dimohonkan dan diproses dari NOP dan Wajib Pajak yang satu kepada NOP dan Wajib Pajak yang lain.

2. Pasal 3 ayat (1) :

   huruf d : Dalam STPD, pajak daerah yang harus dibayar adalah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah), tetapi pada saat pembayaran wajib pajak mencantumkan dalam SSPD sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang disetor sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap selisih sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

   huruf e : Wajib pajak bermaksud membayar pajak restoran untuk masa pajak Januari 2015, namun yang dicantumkan dalam SSPD adalah masa pajak Januari 2014. Terhadap kesalahan tulis tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

   huruf f :
   1. Wajib pajak menyetorkan pajak hotel dalam satu SSPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Hotel A, namun ternyata terjadi kesalahan seharusnya pembayaran pajak tersebut untuk Hotel A Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Hotel B sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hotel C sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap kesalahan setor tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.
   2. PT. X menyetorkan PBB-P2 untuk satu NOP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seharusnya pembayaran tersebut untuk 4 (empat) NOP miliknya yang lain. Terhadap kesalahan setor tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pbk.

   Huruf g : Wajib Pajak melakukan Pbk dari Pajak Reklame kepada PBB-P2 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun petugas melakukan kesalahan perekaman data dengan hanya merekam jumlah Pbk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka kekurangan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus kembali di Pbk secara jabatan oleh petugas dari pajak reklame kepada PBB-P2.

FORMAT 1

UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....
KEPUTUSAN KEPALA UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB
DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB..... /UPPD.....,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
c. bahwa berdasarkan Putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor..... tanggal ..... mengenai ..... yang memutuskan .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.....;
4. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB* TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

KESATU : Melaksanakan putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor ..... tanggal .....
Atas Nama :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :
Masa Pajak :
Nomor Ketetapan :

KEDUA : Besarnya Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Dikurang/ Ditambah	Menjadi
1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	Rp	Rp
2	Pajak Terutang	Rp	RP	Rp
3	Kredit Pajak	Rp	Rp	Rp
4	Jumlah yang kurang/ lebih bayar	Rp	Rp	RP
5	Kelebihan Pajak yang sudah di PBk	Rp	Rp	Rp
6	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
7	Sanksi Administrasi	Rp	Rp	Rp
8	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
9	Pajak yang masih kurang/lebih bayar			Rp

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UPPD... /SUKU DINAS... /UNIT PKB DAN BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMAT 2

UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....
KEPUTUSAN KEPALA UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB
DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB..... /UPPD.....,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor ..... yang diputus tanggal ..... dan diucapkan tanggal ..... mengenai ..... yang memutuskan : .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan .....;
5. Dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB* TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK.

KESATU : Melaksanakan putusan Keberatan Pajak Daerah Nomor ..... tanggal .....

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :
Masa Pajak :
Nomor Ketetapan :

KEDUA : Besarnya Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Dikurang/ Ditambah	Menjadi
1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	Rp	Rp
2	Pajak Terutang	Rp	Rp	Rp
3	Kredit Pajak	Rp	Rp	Rp
4	Jumlah yang kurang/ lebih bayar	Rp	Rp	Rp
5	Kelebihan Pajak yang sudah di PBk	Rp	Rp	Rp
6	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	Rp
7	Sanksi Administrasi	Rp	Rp	Rp
8	Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp	Rp	RP
9	Pajak yang masih kurang/lebih bayar			Rp

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UPPD... /SUKU DINAS... /UNIT PKB DAN BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMAT 3

UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.....
KEPUTUSAN KEPALA UPPD..... /SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB
DAN BBN-KB.....

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS..... /UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB..... /UPPD.....,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penelitian atas Putusan Pengadilan Pajak/Putusan Keberatan* Nomor ..... atas ..... masa pajak ..... atas nama ..... NPWPD/NOPD/NOP .....;
b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* tentang Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan .....;
4. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PKB DAN BBN-KB* TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH.

KESATU : Memberikan imbalan bunga kepada :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun*) Pajak :
Sejumlah : Rp
Terbilang :

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkenaan dengan Putusan Banding/Putusan Keberatan Nomor ..... sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas/UPPD/Unit PKB dan BBN-KB* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UPPD... /SUKU DINAS... /UNIT PKB DAN
BBN-KB.....,

.....
NIP

*Pilih salah satu

Tembusan :
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMAT 4

DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA	**BUKTI PEMINDAHBUKUAN** No. : Pbk.	

Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan : [X] Permohonan Wajib Pajak Nomor ..... Tanggal.....

Dari

Nama	:	.....
Alamat	:	
NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2	:	
Jenis Pajak	:	
Masa/Tahun	:	
STPD/SKPD **) Nomor	:	
Tanggal	:	

Kepada

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2	:	
Jenis Pajak	:	
Masa/Tahun	:	
STPD/SKPD Nomor	:	
Tanggal	:	

Berlaku Sejak	:	.....
Jumlah pemindahbukuan	:	Rp
dengan huruf	:	.....

Jakarta,
Kepala UPPD..../Suku Dinas..../Unit PKB dan BBN-KB.
.....

.....
NIP.....

Tembusan :
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMAT 5

TELAH DIPINDAHBUKUKAN sebesar Rp .....
Nomor : Pbk .....

Jakarta, ...
Kepala UPPD/SUDIN/UNIT PKB DAN BBN-KB
.....
Kepala Seksi .....

.....
NIP .....

FORMAT 6

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
UPPD..../SUKU DINAS..../UNIT PKB DAN BBN-KB .....

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR : ..... Tanggal .....

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
Nama :
Alamat :
NPWP :
Nomor Objek Pajak : -
Alamat Objek Pajak : -
Rekening : Bank :
Nama Rekening :
Nomor Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Nomor / Tanggal : Tanggal :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPDLB / SKPDKB / SKKP PBB / PLB
Nomor : Tanggal :
Nihil : - Kurs : - Jumlah : Rp

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK

1. Melalui Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14							
Total Utang Pajak							-
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKPD (D1)							-

2. Melalui Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/ Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (RP)
1 2	- -	- -		- -			- -	
Total Utang Pajak								
Total Kompensasi Melalui Transfer Pembayaran (D2)								

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1 + D2) **Rp**

F. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) : **Rp**

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
..... NIP.....	..... NIP.....	..... NIP.....	..... NIP.....

FORMAT 7

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA
UPPD..... /SUKU DINAS...../UNIT PKB DAN BBN-KB....

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH
Nomor : .....

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
Nama :
Alamat :
NPWPD :
NOP/NOPD :
Alamat Objek Pajak :
Rekening :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK/KEP. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING
Nomor : ..... (Putusan Banding atau Putusan Keberatan)
: Rp

C. PERHITUNGAN BUNGA
1. Prosentasi Bunga : 2,00 % per bulan
2. Masa Bunga : Mulai tanggal ..... S.d tanggal .....
3. Dasar Penghitungan Bunga : Rp.
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : 2% x ..... Bulan x Rp..... = Rp .....

D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	Masa Pajak	Jenis Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi
1						
Total Utang Pajak						
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMIBPD						

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK : Rp.

E. IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp.

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
..... NIP.....	..... NIP.....	..... NIP.....	..... NIP.....

FORMAT 8

KEPUTUSAN KEPALA .....
.....

NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
KEPADA ..... NPWPD ..... NOPD/NOP .....
JENIS PAJAK ..... MASA/TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA .....
.....

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan .....***) tanggal ..... Nomor ..... hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah telah diterbitkan SKPDLB Nomor ..... tanggal ..... masa/tahun ..... sebesar Rp ..... (.....);
b. bahwa berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan, terdapat kelebihan pembayaran pajak ..... dan telah diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ..... sehingga terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.....;
c. bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dikembalikan atau dipindahbukukan ke pajak .....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... tentang Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah Kepada .....; NPWPD ..... NOPD/NOP ..... Jenis Pajak ..... Masa/Tahun Pajak .....;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... tentang Pajak ..... (Perda jenis-jenis Pajak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA .....

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH :
NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH/NOP*) :
JENIS PAJAK :
Masa/tahun *) Pajak :

KESATU : Kepada .....***) memiliki kelebihan pembayaran Pajak ..... Masa/Tahun*) ..... sebesar Rp ..... (.....).

KEDUA : Kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU direstusikan sebesar Rp ..... (.....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Restitusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui potongan SPMKPD/SPMIBPD sejumlah Rp ..... (.....), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun/ Rekening Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Restitusi (Rp)

KEEMPAT : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diadministrasikan pada:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun/ Rekening Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Restitusi (Rp)

KELIMA : Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU**)

☐ diperhitungkan seluruhnya dengan utang Pajak Daerah dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

☐ masih tersisa sebesar Rp ..... (.....)

Untuk dipindahbukukan oleh .....

Ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening .....

Dan nomor rekening ..... pada Bank .....

di .....

KEENAM : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....
KEPALA .....
.....

.....
NIP .....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda (x) pada kotak (☐) yang sesuai

***) Nama Wajib Pajak

Tembusan :

1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMAT 9

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
UPPD.../SUKU DINAS.../UNIT PKB DAN BBN-KB...

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH
(SPMIBPD)

Nomor : **Tanggal**

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPLB) Nomor :
KEPADA : Kuasa Bendahara Daerah Provinsi DKI Jakarta
Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga

Pada Akun

BA, Eselon, Kode Satker :
: UPPD...../SUDIN.../UNIT PKB & BBN-KB....
Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 Kode Kegiatan dan Output : 0000.000
Kelompok Akun : Jenis Kewenangan :
Cara Bayar : (2)* Giro Bank (2) Giro Bank Tahun Anggaran
Sebesar : Rp.

atas nama
Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
NOP :
Kabupaten/Kota

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB
sejumlah : Rp.
dengan rincian sebagaimana terlampir;
sehingga dibayarkan sebesar : Rp.
untuk:
1) Kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp. dengan rincian sebagaimana terlampir
2) diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp.

melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :
Bank :
nama rekening :
nomor rekening :

Atas beban Rekening Kas Daerah/Bendahara Umum pada Bank Operasional

Jakarta, ...
Kepala /UPPD..../Suku Dinas..../Unit PKB dan BBN-KB....

.....
NIP

FORMAT 10

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (SPMIBPD)
Nomor : ..... Tanggal : .....

RINCIAN PEMINDAHBUKUAN UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB
Nama Wajib Pajak : .....
NPWPD/NOPD/NOP :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWPD/NOPD/NOP*)	Masa / Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kjs	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL						.....	.....

Jakarta,
Kepala UPPD... Suku Dinas...../Unit PKB dan BBN-KB....

.....
NIP